



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan - undangan yang berlaku dan tepat pada waktunya. Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini adalah penyusunan dokumen perencanaan transisi pasca pilkada serentak tahun 2024, Sehingga dapat menjadi pedoman perencanaan hingga kurun waktu 2021-2026 dalam penyelenggaraan pembangunan terkait dengan urusan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga terwujudnya Pembangunan untuk Provinsi Sulawesi Tengah yang sinergi, koordinatif dan saling melengkapi.

Selain itu, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini juga berperan sebagai pedoman dalam mewujudkan kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan dan efektifitas pelaksanaannya.

Ucapan terimakasih dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya agar terselesaikannya laporan kinerja ini. Semoga dokumen ini bermanfaat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah guna mencapai tujuan dan sasaran pokok melalui Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan. Demikian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dibuat dengan penuh tanggung jawab,serta memberi dampak positif bagi kemajuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 06 September 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ABDUL HARIS KARIM, ST., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700422 199303 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penyusunan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN LALU..... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan capaian RENSTRA
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi 18

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RENJA Tahun 2026 19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat 25

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN..... 26

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 26

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan 27

3.3. Program dan Kegiatan 28

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 34

BAB V PENUTUP 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 9

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022-2023 dan Prakiraan 2024-2025 17

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026.....20

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 202525

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah30

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2026 34

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh melalui Program/kegiatan yang direncanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah yang dibiayai APBD melalui alokasi biaya atau input yang ditetapkan, yaitu suatu sistem yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*outcome*) berdasarkan pendekatan kinerja.

Selanjutnya RENJA akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, beberapa landasan hukum yang dijadikan pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687).

2. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
3. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
5. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883).
6. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
7. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah R.I Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045.
12. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah

14. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 57 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi penyusunan program kerja pada Sekretariat dan Bidang-Bidang lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024.
2. Mengarahkan program dan kegiatan seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas pada optimalisasi pencapaian hasil (Outcomes).

b. Tujuan

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dengan tetap memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026 dan Renstra;
2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.
3. Sebagai masukan dan evaluasi untuk semua Unsur Pimpinan yang ada dalam mengendalikan dan memutuskan kebijaksanaan pembangunan pada masa-masa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian dan capaian RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RENJA Tahun 2024

2.5 Penelaah Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan capaian RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi dimaksud meliputi :

1. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, dan
3. Hasil dari Rencana Pembangunan Daerah

Perangkat daerah Menyusun rencana kerja mengacu pada rancangan awal RKPD dan RENSTRA Dinas PERKIMTAN 2021-2026 (revisi). Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Perkimtan dalam memenuhi pelayanan infrastruktur bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan mengacu pada Renstra tersebut. Keberhasilan pelaksanaan pelayanan infrastruktur diukur pada capaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 2021-2026. Jenis pelayanan dan hasil capaian indikator diuraikan sebagai berikut:

- I. Urusan wajib pelayanan dasar dan merupakan SPM
 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana :
 - a. Indikator outcome Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
Pada tahun 2022 target terhadap Renstra adalah sebesar 65.70% atau 7.688 unit yang melayani 30.752 jiwa.
 - b. Indikator outcome Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
Pada tahun 2023 target terhadap Renstra adalah sebesar 89.04% atau 10.462 unit yang melayani 41.848 jiwa
- II. Urusan wajib pelayanan dasar bukan SPM
 1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima belas) Ha
 - a. Indikator outcome: Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani
Pada tahun 2022 target 19 ha (8.64%) yang tercapai 10 ha (4,68%) dari sisa yang belum tertangani 210 ha.
 - b. Indikator outcome: Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani Pada tahun 2023 target 21 ha (10.55%) Masih Sedang Berjalan

2. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- a. Indikator outcome Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU.

Pada tahun 2022 target realisasi 13.04% satuan permukiman yang akan dilayani PSU sebesar 253 desa/kelurahan sehingga yang belum terlayani PSU 1.596 satuan permukiman (desa/kelurahan).

- b. Indikator outcome Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU.

Pada tahun 2023 target realisasi 13.78% satuan permukiman yang akan dilayani PSU sebesar 16 desa/kelurahan sehingga yang belum terlayani PSU 1.580 satuan permukiman (desa/kelurahan).

III. Urusan pilihan bidang pertanahan

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- a. Indikator outcome Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Pada tahun 2022 terealisasi 19.61% atau 33 kasus yang akan ditangani.

- b. Indikator outcome Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Pada tahun 2023 Masih Sedang Berjalan

Capaian evaluasi kinerja dinas Perkimtan sampai dengan tahun 2023 sebagaimana pada **tabel 2.1** berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n- 1)	Realis as i Progra m dan Kegiat a n (Renja PD tahu n n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD tahun n- 2	Realisas i Renja tahun n- 2	Tingkat Realisa si (t-n)			Realisas i capaian Kinerja Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan (tahun n- 1)	Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%)
									2022	2022	2022	2023	2023		
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
					SEKRETARIAT										
1	04	01			PROGRAM PERNUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi	66	60	62	62		64	66	188	47
1	04	01	1.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi perangkat daerah	8 Dokumen	5 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1	8 Dokumen	8 Dokum en	21	5,25
1	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	100%	2 Laporan	100%	2 laporan	1	100%	2 laporan	6	6
1	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	2 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	1	3 Dokumen	3 Dokumen	10	3.33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n- 1)	Realis as i Progra m dan Kegiat a n (Renja PD tahu n n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD tahun n- 2	Realisas i Renja tahun n- 2	Tingkat Realisa si (t-n)			Realisas i capaian Kinerja Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan (tahun n- 1)	Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%)
							2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023		
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
1	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100%	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1	100%	1 Dokumen	3	3
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100%	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1	100%	1 Dokumen	3	3
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pernunjang Urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2 Laporan	100%	2 Laporan	1	100%	2 Laporan	6	6
1	04	01	1.08		penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	1	100%	1 Laporan	3	3

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n- 1)	Realis as i Progra m dan Kegiat a n (Renja PD tahu n n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
							2024	2021	Target Renja PD tahun n- 2	Realisas i Renja tahun n- 2	Tingkat Realisa si (t-n)			Realisas i capaian Kinerja Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan (tahun n- 1)	Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
1	04	01	1.09		pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2 Laporan	100%	100%	1	100%	100%	6	6
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	89,83 %	42,32 %	45,27 %	45,27 %	100%	89,40 %	45,27%	69,54 %	77,7 %
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah yang berada pada Kawasan rawan bencana dan rencana penangannya	50 RT	4.952	12 RT	5.298	1	50 RT	5.298	8.138	162,76

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n- 1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
							2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023		
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	50 unit	4.952	2.736 unit	5.298	1.51	50 unit	5.298	8.138	162,76
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM (Output)	50 RT	4.952	2.736 RT	5.298	1.51	50 RT	5.298	8.138	162,76

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n- 1)	Realis as i Progra m dan Kegiat a n (Renja PD tahu n n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
							2024	2021	Target Renja PD tahun n- 2	Realisas i Renja tahun n- 2	Tingkat Realisa si (t-n)			Realisas i capaian Kinerja Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan (tahun n- 1)	Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentasi Luas kawasan kumuh 10- 15 Ha yang ditangani	12,43%	1,21	8.64 %	4,68 %	0,16	10,55%	4,68 %	5,98 %	0,57 %
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima belas) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	22 ha	4,14	19 Ha	10,304 ha	0.165	21 ha	10,304 ha	14,764	0,70
1	04	03	1.01		penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 S/d 15 Ha	Jumlah luasan (ha)Kawasan pemukiman kumuh 10-15 Ha	177,02 ha	4,14	220,02 Ha	3,3002 ha	0,017	199,02 ha	3,3002 ha	7,77	0,03

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n- 1)	Realis as i Progra m dan Kegiat a n (Renja PD tahu n n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
							2024		Target Renja PD tahun n- 2	Realisas i Renja tahun n- 2	Tingkat Realisa si (t-n)			Realisas i capaian Kinerja Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan (tahun n- 1)	Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
1	04	03			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	14,68 %	12,54 %	13,04%	8,13 %	100 %	13,78 %	8,13 %	23,2 %	1,69 %
1	04	03	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah permukiman yang terfasilitasi PSU	18 Desa	249	14	164	1	16 Desa	164	464	29
2	10	06			Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	Presentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	79,29 %	88,90%	72,57%	72,57%	100 %	76,64 %	72,57%	161,47 %	2,10 %
	2	10	06	1	Penetapan subyek dan objek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah subyek dan objek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi	13 Kab/kota	13 Kab/kota	13 Kab/kota	13 Kab/kota	1	13 Kab/kota	13 Kab/ko ta	26	2

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n- 1)	Realis as i Progra m dan Kegiat a n (Renja PD tahu n n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
							2024	2021	Target Renja PD tahun n- 2	Realisas i Renja tahun n- 2	Tingkat Realisa si (t-n)			Realisas i capaian Kinerja Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan (tahun n- 1)	Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	27,45%	11,76%	19,61%	19,61%	100 %	23,53%	19,61 %	41,96%	1,79 %
	2	10	04	1. 0 1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah kabupaten / Kota dalam Satu (1) daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas penyelesaian Kasus sengketa	38	30	33	33	1	36	33	83	2,30
	2	10	10		Program Penatagunaan Tanah	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai Tepat Waktu	79,29%	88,09%	72,57%	72,57%	100%	76,64%	72,57%	248,75%	3,24 %
	2	10	10	1. 0 1	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.	Dokumen perencanaan tanah yang hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi (dokumen)	14	11	12	12	100%	13	12	33	2,53

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Urusan perumahan dan permukiman sebagaimana yang diatur dalam PP no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pasal 8 SPM perumahan rakyat, ayat 2 jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah Provinsi terdiri atas:

- A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Provinsi.
- B. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Pada Permendagri no 18 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa indikator outcome dan output layanan SPM tersebut diatas adalah:

- a. Outcome: Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
Output: Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi
- b. Outcome: Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.
Output: Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM

- 1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
Pada tahun 2022 untuk indicator persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni adalah sebesar 65.70% atau 7,688 unit yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR dan pemerintah daerah provinsi Sulteng.
Proyeksi target tahun 2023 untuk indicator persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni adalah sebesar 89.40% atau 10,462 unit yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR dan pemerintah daerah provinsi Sulteng.
Proyeksi target tahun 2024 untuk indicator persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni adalah sebesar 89.83% atau 10,512 unit yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR dan pemerintah daerah provinsi Sulteng.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada **Tabel 2.2** berikut:

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022-2023 dan Prakiraan 2024-2025

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun				Tahun		Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	7.688 unit/ 65.70 %	10.462 Unit / 89.40%	10.512 Unit / 89.83%	10.562 Unit / 90.26%	5.298 unit/ 45,27 %		10.512 Unit / 89.83%	10.562 Unit / 90.26%	
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	-	-	-	-		-	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi

Dinamika organisasi pemerintahan dewasa ini menuntut adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang lebih kreatif, inovatif dan adaptif. Oleh karenanya, selain dibutuhkan komitmen yang kuat dari penentu kebijakan juga adanya motivasi seluruh aparatur untuk bekerja lebih keras dan cerdas serta disiplin tinggi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang strategis. Dalam kaitan ini maka kedudukan, peran dan fungsi setiap aparatur harus berjalan secara optimal. Untuk itu dapat dikemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sampai dengan tahun 2021 baru terealisasi 42.28%, masih tersisa 57.72% yang belum tertangani. Penetapan target sampai dengan tahun 2023 dengan asumsi bahwa anggaran penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dari kementerian PUPR teralokasi sesuai dengan MOU dengan bank dunia berakhir pada tahun 2023. Sehingga yang akan ditangani oleh pemerintah Provinsi sampai dengan akhir masa Renstra 2021-2026 adalah 1.302 unit.
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2021 Belum memiliki target yang ditetapkan, karena belum adanya program Pemerintah Provinsi yang mengakibatkan relokasi. Akan tetapi dengan adanya Kawasan rawan bencana banjir di desa Tayawa, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo una-una maka pada tahun 2022 pemerintah daerah Provinsi memprogramkan perencanaan DED perumahan untuk masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai tersebut. Dimana pembangunannya akan dilaksanakan pada tahun 2023 s/d 2024. Pada tahun 2023 pemerintah memprogramkan perencanaan DED perumahan di Kabupaten Sigi dan pembangunannya pada tahun 2025 s/d 2026.
2. peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha, yang telah ditetapkan melalui surat keputusan bupati/walikota namun belum disertai dengan deliniasi Kawasan kumuh kewenangan provinsi 10-15 ha.
3. peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu), perlu ditindaklanjuti dengan deliniasi satuan permukiman yang telah dan belum terfasilitasi oleh PSU permukiman.
4. penyelesaian sengketa tanah garapan, perlu peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dalam hal inventarisasi asset pemerintah daerah provinsi yang digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau oleh masyarakat perorangan maupun badan usaha, dalam menyelesaikan sengketa tanah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RENJA Tahun 2025

Dokumen RENJA ini merupakan sub sistem penting sebagai input dalam penyusunan program dan penganggaran OPD. Dokumen RENJA ini merupakan dokumen publik, sehingga melibatkan semua *stakeholders* dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RENJA ini dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2025, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, ketersediaan sumber pembiayaan yang dimiliki, sehingga dapat diketahui masalah dan tantangan pembangunan yang dinilai dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Pada rancangan RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 seluruh program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 7 program dan 18 Kegiatan selanjutnya akan dijabarkan beserta kegiatan-kegiatan masing-masing program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel 2.3** berikut:

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Perubahan tahun 2025

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan				Rp 120,254,351,274
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Reformasi Birokrasi	66	Rp 15,254,948,659
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 KAB/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi perangkat daerah	8 Dokumen	Rp 240,820,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA PALU	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	2 Laporan	Rp 12,218,498,684
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13 KAB/KOTA	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	Rp 70,400,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13 KAB/KOTA	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	Rp 107,622,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA PALU	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	Rp 802,303,950

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	KOTA PALU	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Rp 92,920,000
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	KOTA PALU	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Rp 515,622,825
	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	KOTA PALU	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	Rp 1,206,761,200
	Program Pengembangan Perumahan		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	89.83%	Rp 10,991,852,750
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	13 Kab/Kota	Jumlah rumah yang berada pada Kawasan rawan bencana dan rencana penangannya	50 RT	Rp 126,352,750

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Desa Poi Kab. Sigi, DED Huntap kab.Donggala	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	61 UNIT	Rp 10,805,950,000
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kabupaten Sigi dan Kabupaten Morowali, Kab. Bangkep, Kab. Parigi Moutong, Kab. Poso, dan Kab. Tojo una-una	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM (Output)	12 RT	Rp 24,420,000
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	50 RT	Rp 35,130,000
	Program Kawasan Permukiman		Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	12,43%	Rp 17,612,472,792

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	13 Kab/Kota	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Rp 3,820,659,500
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima belas) Ha	Palu, Poso, Sigi, Parigi Moutong, Morowali Utara, Buol , Banggai, TojoUnauna, Donggala dan ToliToli	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	22 Ha	Rp 13,791,813,292
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	14,68%	Rp 75,870,222,273
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Sigi, Donggala, Morowali Utara, Tojo Unauna, Tolitoli, Poso dan Banggai	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	61 Desa	Rp 75,870,222,273

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		Persentase Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	79,29%	Rp 59,715,100
	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	13 Kab/Kota	Jumlah subjek dan objek redistribusi tanah lintas daerah Kabupaten Kota dalam satu daerah Provinsi	13 Kab/kota	Rp 59,715,100
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	27,45%	Rp 429,099,700
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah kabupaten / Kota dalam Satu (1) daerah Provinsi	13 Kab/Kota	Jumlah Fasilitasi penyelesaian Kasus sengketa	38	Rp 429,099,700

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

Usulan program/kegiatan masyarakat melalui pemerintah kabupaten/kota pada tahapan Musrembang desa,kecamatan,dan kabupaten yang dibahas pada forum OPD Musrembang ditingkat provinsi. Adapun hasil yang dimaksud adalah sebagaimana tertera pada **Tabel 2.4** berikut :

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 :

No .	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Kab, Sigi	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	5 Desa	
2	Program Kawasan Permukiman		Persentase Luasan Kawasan Kumuh		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima belas) Ha	Kab, Parigi Moutong, Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Banggai laut, Kab. Banggai Kab. Tojo Una una, Kab. Toli toli Kab. Buol Kab. Sigi Kab. Donggala Kab. Poso Kota Palu	Jumlah	73 Desa	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 adalah pembangunan infrastruktur yang memiliki peran penting sebagai katalisator antara proses produksi, pasar dan konsumen akhir serta memiliki peranan sebagai *social overhead capital*. Infrastruktur dipandang sebagai modal memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur mampu menciptakan lapangan kerja dan *multiplier effect* bagi sektor industri. Bahkan dengan kebijakan dan komitmen yang tepat, selain menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar- kawasan maupun antar wilayah, memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi tekanan urbanisasi yang semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi nasional adalah adanya keterbatasan infrastruktur. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas yakni membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan mengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem atau dengan kata lain menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Tujuan dan sasaran merupakan perencanaan strategis yang sangat penting dalam perjalanan suatu organisasi, kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru suatu otonomi daerah, oleh karena itu suatu organisasi harus mampu mengakomodir dinamika tersebut.

Guna melaksanakan Misi ke-3 Gubernur Sulawesi Tengah yaitu **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor”**. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan rumusan tujuan Meningkatnya penyediaan perumahan, penataan kawasan permukiman dan terfasilitasinya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta penyelesaian sengketa tanah lintas Kabupaten/Kota. Guna mencapai tujuan di atas, maka rumusan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi rumah yang terkena program pemerintah Provinsi.
 - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.
 - Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
2. Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.
 - Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU.
3. Tertatanya lingkungan permukiman kawasan kumuh.
 - Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani.
4. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan ganti rugi tanah garapan dan bangunan pemerintah.

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah telah merumuskan rencana 5 tahun (2025-2029) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rumusan program dan kegiatan ini didasarkan atas peran serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah untuk Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Yang Maju dan Berkelanjutan melalui Misi ke-3 Gubernur Sulawesi Tengah yaitu **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor”**

Guna menindaklanjuti agenda sebagaimana dimaksud dalam RPJMD pada tahun 2025-2029 sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan diselaraskan dengan ***Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Kodifikasi, Nomenklatur, Klasifikasi Rencana Pembangunan dan Keuangan Daerah*** dengan memperhatikan program-program yang menyangkut urusan Provinsi. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah.
- b. Program Pengembangan Perumahan terdiri dari :
 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;

3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
- d. Program Kawasan Permukiman terdiri dari :
 1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima Belas) Ha.
- e. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan terdiri dari :
 1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 Daerah Provinsi.
- f. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
 1. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
- g. Program Penatagunaan Tanah
 1. Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				120.254.351.274				180.679.765.741,16
					Sekretariat								
1	04	01			PROGRAM PERNUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi	KOTA PALU	66	15.254.948.659	APBD PROVINSI		70,05	10.364.135.137,32
1	04	01	1	01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	KOTA PALU	8 Dokumen	240.820.000	APBD PROVINSI		8 dokumen	81.760.000,00
1	04	01	1	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	KOTA PALU	100%	12.218.498.684	APBD PROVINSI		100%	9.381.098.667,32
1	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	KOTA PALU	3 dokumen	70.400.000	APBD PROVINSI		3 Dokumen	35.000.000,00
1	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	KOTA PALU	100%	107.622.000	APBD PROVINSI		100%	20.368.000,00
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	KOTA PALU	100%	802.303.950	APBD PROVINSI		100%	133.550.545,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOTA PALU	100%	92.920.000	APBD PROVINSI		100%	40.000.000,00
1	04	01	1.08		penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA PALU	100%	515.622.825	APBD PROVINSI		100%	502.357.925,00
1	04	01	1.09		pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA PALU	100%	1.206.761.200	APBD PROVINSI		100%	170.000.000,00
1	04	02			Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		89.83%	10.991.852.750			90,69%	40.439.048.232,00
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM (output)		50 RT	126.352.750	APBD Provinsi		50 RT	2.154.862.000,00.
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM (Output)		12 RT	24.420.000	APBD Provinsi		50RT	506.807.800,00
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		61 Unit	10.805.950.000	APBD Provinsi		50 unit	37.277.378.432,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		50 RT	35.130.000	APBD Provinsi		50 unit	500.000.000,00
1	04	03			Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani		12,43%	17.612.472.792	APBD Provinsi		18.46%	66.241.958.871,84
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima belas) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		22 Ha	3.820.659.500	APBD Provinsi		24 Ha	10.435.399.600,00
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima belas) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Palu, Poso, Sigi, Parigi Moutong, Morowali Utara, Buol, Banggai, Tojo Una-una, Donggala dan ToliToli	22 Ha	13.791.813.292	APBD Provinsi		24 Ha	55.806.559.271,84
1	04	03			Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU		14,68%	75.870.222.273	APBD Provinsi		16.76%	58.899.824.000,00
1	04	03	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah permukiman yang terfasilitasi PSU	Palu, Sigi, Donggala, Morowali Utara, Tojo Unauna, Tolitoli, Poso dan Banggai	61 Desa	75.870.222.273	APBD Provinsi		22 Desa	58.899.824.000,00
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				524.854.800				4.734.799.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		79,29%	59.715.100	APBD Provinsi		89.42%	1.597.870.000,00
2	10	06	1.01		Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah subjek dan objek redistribusi tanah lintas daerah Kabupaten Kota dalam satu daerah Provinsi	13 Kab/Kota	13	59.715.100	APBD Provinsi		13	1.597.870.000,00
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		27,45%	429.099.700	APBD Provinsi		35.29%	1.487.962.750,00
2	10	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah kabupaten / Kota dalam Satu (1) daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas penyelesaian Kasus sengketa	13 Kab/Kota	38	429.099.700	APBD Provinsi		44	1.487.962.750,00
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai Tepat Waktu		79,29%	36.040.000	APBD Provinsi		89.42%	372.729.750,00
2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.	Dokumen Peletakan Lokasi Rencana Penggunaan Tanah yg telah jelas Tahapan Kegiatan dan Penggarannya	13 Kab/Kota	1 Dokumen	36.040.000	APBD Provinsi		16	372.729.750,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2025

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2025		
								Target	Rp	
3					4	5	6	7	8	9
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				120.254.351.274	
					SEKRETARIAT					DINAS PERKIMTAN
1	04	01			PROGRAM PERNUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi		66	15.2554.948.659	
1	04	01	1.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi perangkat daerah		8 dokumen	240.820.000	
1	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan		100%	12.218.498.684	

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2025		
								Target	Rp	
3					4	5	6	7	8	9
1	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		3 Laporan	70.400.000	
1	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan		100%	107.622.000	
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		100%	802.303.950	
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pernunjang Urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	92.920.000	
1	04	01	1.08		penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	515.622.825	
1	04	01	1.09		pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.206.761.200	

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2025		
								Target	Rp	
3					4	5	6	7	8	9
1	04	02			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		89.83%	10.991.852.750	
1	04	02	1.03		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		50 RT	126.352.750	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		61 Unit	10.805.950.000	
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		50 rt	35.130.000	

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2025		
								Target	Rp	
3					4	5	6	7	8	9
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM (Output)		12 RT	24.420.000	
1	04	03			Program Kawasan Permukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang Ditangani		12.43%	17.612.472.792	
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima belas) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		1 Dokumen	3.820.659.500	
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima belas) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		22 Ha	13.791.813.292	
1	04	03			Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU		14.68%	75.870.222.273	
1	04	03	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU		61Desa/Kelurahan	75.870.222.273	

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2025		
								Target	Rp	
3					4	5	6	7	8	9
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		79.29%	59.715.100	
2	10	06	1.01		Penetapan Subyek dan Objek redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi	Jumlah subjek dan objek redistribusi tanah lintas daerah Kabupaten Kota dalam satu daerah Provinsi		13 Kab/kota	59.715.100	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		27.45%	429.099.700	
2	10	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah kabupaten / Kota dalam Satu (1) daerah Provinsi	Jumlah Fasilitasi penyelesaian Kasus sengketa		38 Kasus	429.099.700	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai Tepat Waktu		79.29%	36.040.000	
2	10	10	1.01		Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.	Dokumen perencanaan tanah yang hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi		13 Kab/kota	36.040.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan kondisi yang realistis dari perencanaan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Keseimbangan gerak pembangunan mengisyaratkan bahwa aktifitas perencanaan harus bergulir dan mengalami perbaikan-perbaikan untuk peningkatan kualitasnya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalam Rencana Kerja ini, namun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 tergantung pada sikap, mental, tekad serta semangat dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitannya, maka diharapkan seluruh aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Rencana Kerja Anggaran di setiap Bidang sebagai dokumen yang mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Renstra Revisi Tahun 2021-2026 sehingga pelaksanaan rencana berjalan secara sistematis dan sinergi serta berkesinambungan.

Palu, 06 September 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ABDUL HARIS KARIM, ST., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700422 199303 1 011